

Mewujudkan Pembangunan Pertanian Inklusif Berorientasi Agribisnis¹

Gede Sedana²

1. Pendahuluan

Pembangunan pertanian masih sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia sebagai negara agraris. Selain karena kontribusinya yang besar, sektor pertanian juga memberikan berbagai manfaat bagi pembangunan ekonomi dan lingkungan. Pertanian memiliki peran dalam menyediakan bahan pangan, menyediakan kesempatan kerja, menghasilkan bahan baku untuk industri, mengkonsumsi produk-produk industri selain menghasilkan devisa (Muhammad-Lawal, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, kebijakan yang pro-pertanian perlu semakin ditingkatkan untuk menyediakan pangan, memperluas kesempatan berusaha dan bekerja, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan di bahkan di tingkat nasional (Sedana dan Astawa, 2019).

Selain itu, akselerasi pembangunan pertanian diharapkan membantu mengatasi tingginya angka pengangguran dan urbanisasi dan sekaligus mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Pembangunan industri di dalam negeri juga memiliki keterkaitan yang kuat dan bahkan saling melengkapi dengan pembangunan pertanian, baik pada industri hulu maupun industri hilir. Dalam skala internasional, pembangunan pertanian juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara (devisa) karena komoditas pertanian yang bersifat global dalam perdagangan internasional.

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap struktur perekonomian nasional, yaitu dalam Penerimaan Domestik Bruto. Seperti dilaporkan oleh Harian Kompas bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam struktur PDB Indonesia, dimana persentasenya adalah sebesar 12,84 persen pada kuartal pertama (Q1) 2020 (Anon., 2020). Oleh karena itu, sektor pertanian perlu semakin dikembangkan dan diperkuat dalam upaya untuk mempercepat lagu pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat Indonesia, khususnya di perdesaan.

Pembangunan perdesaan merupakan integral dari pembangunan secara luas di tingkat nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga masyarakat, khususnya mereka yang relatif miskin. Secara konsep, pembangunan perdesaan diselenggarakan secara komprehensif dan multidimensi, dimana dapat mencakup pengembangan pertanian dan kegiatan sejenisnya, industri perdesaan, kerajinan rumah tangga dan industri kecil, infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial-ekonomi. Selain itu, pembangunan perdesaan juga meliputi layanan dan fasilitas masyarakat, pengembangan sumber daya manusia di perdesaan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang masih sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan di banyak Negara, khususnya negara sedang berkembang (Yaghoubi et al, 2011; Adelman, 2001). Pertanian di negara-negara berkembang memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkembangan ekonomi perdesaan (Khorami and Pierof, 2013).

¹ Materi yang dipresentasikan pada Seminar nasional tentang Revitalisasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Dwijendra, di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2020.

² Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra, Denpasar

Kontribusi relatif dari sektor pertanian semakin berkurang terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kadangkala focus perhatian pada sektor pertanian menjadi menurun demi perolehan kontribusi yang lebih tinggi dari sektor non-pertanian, misalnya industri (Gollin *et al*, 2002).

Memperhatikan berbagai isu yang terjadi perdesaan dan pertanian seperti disajikan pada Tabel 1, dan dalam upaya mengatasi kemiskinan yang lebih banyak terjadi di sektor pertanian, maka pada tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan strategi pembangunan pertanian.

2. Membangun Pertanian

2.1 Kondisi pertanian secara umum

Pengalaman di Indonesia telah memberikan gambaran bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB selalu memiliki tren peningkatan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun, secara relatif, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan terhadap PDB secara nasional. Ada beberapa hal yang diduga menjadi faktor penyebabnya, di antaranya adalah ketimpangan kebijakan makro dan mikro ekonomi, sehingga potensi sektor pertanian yang besar belum dapat dikelola dan dimobilisasi secara optimal. Selain itu, masih dijumpai adanya pembangunan pertanian yang bias perkotaan. Artinya bahwa, pembangunan pertanian yang dilakukan melalui industrialisasi dan modernisasi pertanian lebih cenderung memberikan keuntungan warga masyarakat di perkotaan, karena para petani tidak memperoleh nilai tambah produk yang layak. Pemanfaatan dan aplikasi teknologi budidaya pertanian dan pasca-panen belum sepenuhnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga tujuan pembangunan pertanian belum dapat tercapai dan memiliki imbas pada pembangunan perdesaan.

Hingga saat ini, pembangunan pedesaan telah menarik perhatian dan menjadi isu tertentu bagi para pelaku pembangunan termasuk perencana pembangunan di berbagai negara. Kondisi ini tidak terlepas dari angka kemiskinan di perdesaan masih besar (lihat Gambar 1). Padahal tujuan pembangunan di Indonesia termasuk yang diamanatkan oleh badan-badan dunia melalui *Sustainable Development Goals* adalah mengurangi angka kemiskinan. Berbagai program pembangunan diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan bahkan kelaparan yang terjadi, khususnya mereka yang bekerja pada sektor pertanian di perdesaan. Oleh karena itu, pergeseran dalam penekanan dan pendekatan yang diperlukan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan sesuai dengan tujuan kebijakan pembangunan secara keseluruhan untuk pengentasan kemiskinan yang cepat.

Berdasarkan pada data statistik yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2020, disebutkan bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya sebanyak 24,79 juta jiwa pada September 2019. Secara relatif, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,22% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin September 2019 di daerah perkotaan sebesar 9,86 juta orang. Jumlah penduduk miskin daerah pedesaan sebesar 14,93 juta orang pada September 2019 (<https://bisnis.tempo.co/read/1332671/skenario-terberat-ada-85-juta-orang-miskin-baru-akibat-corona/full&view=ok>)

Gambar 1 Angka kemiskinan di Indonesia



Pembangunan pertanian dan pedesaan telah dilakukan di banyak negara-negara yang sedang termasuk negara maju dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 49,41% rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Beberapa isu yang sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia berkenaan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah kemiskinan, teknologi dan lain sebagainya seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Isu-isu pembangunan pedesaan dan pertanian

Isu pedesaan	Isu pertanian
1. Kemiskinan	1. Kemiskinan
2. Pengangguran	2. Produksi rendah
3. Ketimpangan	3. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia
4. Kerentanan ekonomi masyarakat desa	4. Terbatasnya teknologi
5. Terbatasnya akses informasi, komunikasi dan teknologi	5. Terbatasnya modal
6. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana fisik	6. Terbatasnya prasarana dan sarana pendukung pertanian
7. Terbatasnya keberdayaan masyarakat desa	7. Pasar produk pertanian
8. Terbatasnya investasi	8. Gagal panen (serangan hama dan penyakit, cuaca)
	9. Alih fungsi lahan
	10. Pajak tanah yang tinggi

Adanya isu-isu di atas tersebut mengakibatkan pembangunan pertanian di Indonesia tidak dapat berjalan dengan mulus dan lancar. Sektor pertanian memiliki sifat-sifat yang memerlukan penanganan secara spesifik dan berbeda-beda dari satu wilayah

dengan wilayah lain dan dari satu komoditas dengan komoditas lainnya, serta antar kelompok masyarakat petani. Keterbatasan luas areal lahan, topografi lahan dan sifat fisik biologis dan kimia tanah juga sangat berpengaruh pada subsistem budi daya pertanian atau pada tingkat *on-farm*. Sempitnya luas lahan yang dikelola oleh para petani diperburuk lagi oleh adanya kondisi lokasi lahan yang terpencar-pencar dan akses transportasi belum lancar. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam membangun agribisnis yang kuat karena dapat menyebabkan biaya produksi dan biaya pemasaran menjadi tidak efisien. Saat ini, menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama, apakah pemerintah berani memosisikan pembangunan pertanian sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional (*agricultural-led development*)?. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa sektor pertanian harus dibangun sebagai dasar menumbuhkan dan menggerakkan sektor-sektor lainnya dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional.

2.2 Membangun Pertanian dan Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pertanian dan pedesaan seperti dua sisi mata uang karena memiliki hubungan yang erat. Memperhatikan karakter pedesaan yang paling utama adalah bersentuhan dengan sektor pertanian maka pembangunan yang dilaksanakan secara hakiki perlu memiliki orientasi pembangunan pertanian. Membangun pertanian memerlukan adanya perencanaan yang matang dengan berbasis pada spesifik lokasi. Pembangunan pertanian diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam upaya untuk mewujudkan peran pertanian, seperti: (i) tetap menjamin ketersediaan pangan; (ii) menyediakan kesempatan berusaha dan kerja; (iii) menjadikan wahana dalam mempersempit gap (kesenjangan) pendapatan, pembangunan antar warga masyarakat termasuk kesenjangan antar wilayah; (iv) menghasilkan bahan mentah dan bahan baku bagi industri dan sekaligus sebagai konsumen atau pengguna produk-produk yang dihasilkan industri; (v) meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya; (vi) menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin manfaatnya bagi generasi mendatang; (vii) memberikan kontribusi dalam PDB; dan (viii) menghasilkan devisa bagi negara. Oleh karena itu, dalam membangun pertanian perlu dilandasi oleh asas keberlanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan ekologis (Wibowo, 2004).

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang memihak kepada kelembagaan petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian guna menciptakan kekuatan daya saing di pasar dalam negeri dan luar negeri. Salah satu upaya yang diperlukan adalah pendekatan pembangunan pertanian inklusif yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan. Membangun pertanian inklusif berorientasi agribisnis dilakukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya karena sektor pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan, menyediakan bahan mentah bagi sektor industri pertanian, memiliki kontribusi terhadap devisa negara, dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Dalam orientasi agribisnis, pembangunan pertanian (arti luas) perlu dibangun pertanian inklusif yang memberikan peran bagi seluruh aktor pasar yang terlibat di dalam rantai pasok (*supply chain*). Integrasi dari hulu sampai hilir menjadi kunci utama untuk terwujudnya tujuan pembangunan pertanian. Sektor pertanian didorong untuk mengubah paradigma yaitu dari pola usahatani subsisten menuju pertanian yang komersial. Pertanian komersial merupakan pertanian modern untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing. Melalui penerapan prinsip agribisnis, peran

agroindustri akan menjadi sangat penting untuk menjadi penggerak secara bersama-sama dan terintegrasi dengan sektor pertanian guna menciptakan link yang kuat dan dinamis di antara agroindustri hulu dengan pertanian dan agroindustri hilir.

Berpedoman pada syarat pokok dalam membangun pertanian yang sangat membutuhkan lima elemen seperti pasar, teknologi yang senantiasa berubah, ketersediaan teknologi secara local, insentif, dan transportasi, maka pembangunan pertanian harus mengintegrasikan kelima elemen tersebut (lihat Gambar 2).

Gambar 2 Elemen syarat pokok pembangunan pertanian



Kelima elemen syarat pokok di atas dikemas dalam prinsip agribisnis yang memadukan dari sistem hulu sampai ke hilir. Subsistem penyediaan sarana produksi sebagai sistem hulu merupakan implementasi dari bahan dan alat produksi yang tersedia bagi penyelenggaraan usahatani dalam arti luas. Ketersediaan sarana produksi dan alat serta mesin pertanian dimanfaatkan oleh petani produsen (termasuk peternak, pekebun, dan pelaku lainnya) untuk beraktifitas pada *on-farm* yaitu sistem budidaya atau system produksi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, teknologi budidaya dalam bentuk *good agricultural practices* menjadi komponen yang sangat utama. Transfer teknologi budidaya dilakukan melalui aktivitas penyuluhan dan pelatihan di tingkat petani melalui kelompoknya. Secara sederhana, prinsip-prinsip penyuluhan pertanian harus diterapkan guna mewujudkan *better farming*, *better business*, *better living* dan *better ecology/environment*.

Industri hilir harus hadir dalam pembangunan pertanian inklusif untuk mengambil peran dalam aktivitas pasca-panen yang menyangkut pengolahan, penyimpanan dan pemasaran. Selain konsumen langsung, produk-produk pertanian juga harus menjadi bagian atau penuplai bahan mentah ke industri hilir ini. Proses produksi pengolahan dan pemasaran melalui industri ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah produk, menyediakan produk bagi konsumen baik petani dan bukan petani. Konsep 4 (empat) guna menjadi landasan dalam penyelenggaraan aktivitas pada subsistem pengolahan dan pemasaran. Ke empat guna tersebut adalah guna bentuk, guna tempat, guna waktu dan guna milik.

Sementara itu, pemerintah sebagai regulator memiliki peranan yang memberikan iklim kebijakan yang kondusif yang menunjang pembangunan pertanian dan berintegrasi serta sinergi dengan sektor-sektor lainnya. Beberapa kebijakn pemerintah yang perlu diambil untuk membangun pertanian inklusif ini adalah sebagai berikut: (i) membangun dan memperkuat pendidikan pertanian guna menghasilkan tenaga pendamping atau penyuluh yang memiliki kompetensi, dan juga pendidikan kepada

generasi muda untuk memiliki keterampilan pertanian (ii) mendorong terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat kapasitas kelembagaan pertanian dan membangun serta mengembangkan prasarana dan fasilitas pertanian; (iii) membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang menjamin adanya konektivitas antar wilayah. Membangun dan mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk memudahkan akses informasi dan teknologi sampai ke tingkat petani di desa-desa yang terpencil; dan (iv) mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung terwujudnya pertanian inklusif.

Penutup

Hingga saat ini, sektor pertanian masih berperan dalam pembangunan ekonomi secara nasional karena mampu menyediakan bahan pangan, kesempatan kerja dan berusaha, menghasilkan bahan baku untuk industri pertanian, dan berkontribusi pada devisa. Kondisi saat ini kemiskinan perdesaan masih didominasi oleh mereka yang berkeja di sector pertanian. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya membangun pertanian inklusif yang berorientasi agribisnis dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan adalah membangun pendidikan pertanian, mendorong terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan, membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang menjamin adanya konektivitas antar wilayah, membangun dan mengembangkan prasarana telekomunikasi, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung pertanian.

Daftar Pustaka

- Anonimus. 2020. PDB Pertanian Naik di Triwulan I, Kementan Prediksi Kenaikan Berlanjut Hingga 2021", <https://money.kompas.com/read/2020/05/07/161340626/pdb-pertanian-naik-di-triwulan-i-kementan-prediksi-kenaikan-berlanjut-hingga>.
- Adelman, I. (2001). *Fallacies in development theory and their implications for policy*. In G. M. Meier, & J. E. Stiglitz (Eds.), *Frontiers of development economics: The future in perspective* :103–135. New York: World Bank.
- Muhammad-Lawal, A., O.A. Omotesho and A. Falola, 2009. *Technical efficiency of youth participation in agriculture: A case study of the youth in agriculture programme in Ondo state, south western Nigeria*. *Niger. J. Agri. Food Environ.*, 5(1): 20-26.
- Khorami, A.R. and S. Pierof. 2013. *The Role of Agriculture in Iran's Economic Development*. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology* 6(11): 1928-1939.
- Gollin, D., S. Parente, and R. Rogerson, 2002. *The Role of Agriculture in Development*. *American Economic Review* 92 (1), 160-164.
- Olsson, O. and D.A. Hibbs, 2005. *Biogeography and Long-Run Economic Development*. *European Economic Review*, 49 (4), 909-938.
- Wade, R.H. 2004. 'Is Globalization Reducing Poverty and Inequality?', *International Journal of Health Sciences* 34(3), 381-414.
- Wibowo, R. 2004. Rekonstruksi Perencanaan Pembangunan (Pertanian) Mendatang, Beberapa Catatan Kritis, Dalam Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian (Wibowo, R. B. Krisnamurti dan B. Arifin (ed). 2004. Jakarta: Perhepi.
- Yaghoubi, J., M. E. Shokri, and J. M. Gholiniy. 2011. *Assessing Agricultural Insurance Agents Attitude Towards E-Learning Application in Teaching Them*. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 15: 2923–2926.

